

Modus Diselipkan Uang Rupiah Asli Lima Tersangka Upal Ditangkap

SLEMAN (KR) - Dua kasus peredaran uang palsu (upal) yang melibatkan 5 orang tersangka, dirilis Ditreskrimsus Polda DIY, Kamis (24/4). Sejumlah barang bukti termasuk upal pecahan 100.000, juga telah disita oleh polisi. Masyarakat harus waspada, mengingat sejumlah upal milik tersangka, sudah diedarkan.

Kasubdit 2 Ditreskrimsus Polda DIY AKBP Joko Hamitoyo menjelaskan,

perkara yang dirilis terdiri dari 2 kasus yang ditangani oleh Polresta Yogya dan Polsek Turi Polresta Sleman. "Modus pertama yakni upal digunakan untuk membeli baju, rokok dan kebutuhan sehari-hari di toko-toko. Kedua, upal diedarkan dengan cara menyelipkannya di antara uang rupiah asli, saat transaksi di agen mitra bank," ungkapnya.

Kasat Reskrim Polresta Yogya Kumpul Probo Satrio

menjelaskan, tiga tersangka yang diamankan jajarannya adalah DA (46) dan RI (40) keduanya warga Kasihan Bantul serta DP (43) warga Kraton Yogya. Pengungkapan kasus itu diawali adanya laporan dari seorang pemilik toko di wilayah Mantrijeron, yang mendapatkan upal pecahan 100.000 dari seorang pembeli pada Sabtu (5/4). Setelah dilakukan penyelidikan dan rekaman CCTV, polisi

menangkap pelaku yaitu DP.

Saat diinterogasi, DP mengatakan membeli upal dari tersangka RI sebesar Rp 400.000 dan mendapatkan upal pecahan 100.000 sebanyak 8 lembar. "Tersangka RI mengaku membeli upal dari tersangka DA sebesar Rp 650.000 dan mendapatkan upal pecahan 100.000 sebanyak 13 lembar," ungkap Probo.

Saat dikembangkan, DA mengaku mendapatkan upal dengan cara membeli dari A (belum tertangkap) sebesar Rp 30 juta dan mendapatkan upal pecahan 100.000 sebanyak 1.000 lembar. Dari 1.000 lembar upal tersebut, sebanyak 900 lembar diakui DA sudah ia musnahkan karena kualitasnya jelek. Kemudian sisanya telah beredar di masyarakat, termasuk sudah dibeli oleh tersangka lainnya.

* Bersambung hal 9 kol 1



KR-Instagram @vaticannews

Umat Katolik mendoakan Paus Fransiskus yang jenazahnya disemayamkan di Basilika Santo Petrus Vatikan.



KR-Wahyu Priyanti

Petugas memperlihatkan barang bukti dan tersangka kasus peredaran uang palsu.



Analisis QRIS Naik Kelas

Agung Pambudi

DALAM beberapa minggu ini kita disodori dengan berita di media masa tentang defisit perdagangan negara Amerika dengan 20 negara dan negara Indonesia menempati urutan ke 15, menurut BPS kontribusi Indonesia sebesar 1,40 %.

Menurut Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang dikutip, Sabtu, 19 April 2025, "Kami sudah berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia, terutama terkait dengan payment yang diminta oleh pihak Amerika. Dalam forum negosiasi perdagangan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat, menyoroti penggunaan sistem pembayaran domestik seperti QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional, yang dianggap oleh pemerintah Amerika Serikat membatasi ruang gerak perusahaan asing. QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) awalnya dirancang untuk menyederhanakan transaksi digital di tingkat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk warung, pedagang kaki lima, dan pasar tradisional.

* Bersambung hal 9 kol 3

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
Jumat, 25 April 2025	11:40	15:00	17:36	18:46	04:24

Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

BP HAJI LANTIK HARUN AL RASYID Perkuat Fungsi Pengawasan Haji

BEKASI (KR) - Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia (BP Haji) resmi melantik Eks Penyidik KPK Harun Al Rasyid sebagai Deputy Bidang Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi. Pelantikan yang digelar di Asrama Haji Bekasi ini, merupakan bagian dari langkah strategis BP Haji memperkuat fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel.

Pelantikan dilakukan Kepala BP Haji, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) disaksikan Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, Sekretaris Utama Teguh Dwi Nugroho serta jajaran pejabat BP Haji dan para undangan.

Dalam sambutannya, Gus Irfan menyampaikan, posisi deputy pengawasan sangat krusial mengingat kompleksitas tantangan penyelenggaraan haji setiap tahunnya.

"Dengan dilantikannya Harun Al Rasyid, kami semakin siap menjawab tugas negara, khususnya dalam memperkuat fungsi pengawasan. Sesuai arahan Presiden, penyelenggaraan haji harus berjalan dengan prinsip efektif, aman, nyaman dan transparan," ujar Irfan.

Harun Al Rasyid bukan sosok baru dalam dunia pengawasan dan penegakan hukum. Ia dikenal luas sebagai Raja OTT saat bertugas sebagai penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena kiprahnya yang menonjol dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku korupsi. Terakhir, Harun Al Rasyid berkarier di Kepolisian RI.

Ia juga menekankan pentingnya keberanian berpikir out of the box dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah, selama tetap dalam koridor hukum dan regulasi.

* Bersambung hal 9 kol 3

PLESETKAN MARGA PONO MENJADI PORNO Ahmad Dhani Dilaporkan ke MKD DPR

JAKARTA (KR) - Musisi Rayendie Rohy Pono alias Rayen Pono melaporkan Anggota DPR RI Ahmad Dhani ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Suami Mulan Jameela tersebut dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik terkait plesetkan marga Pono menjadi porno.

"Saya beserta tim kuasa hukum datang secara langsung mengantarkan berkas pengaduan kami terkait pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ahmad Dhani selaku anggota DPR RI, Komisi X," kata Rayen di Kantor MKD, Jakarta, Kamis (24/4).

Rayen juga menyebut laporan kepada MKD tersebut adalah bentuk keseriusannya dalam menanggapi pernyataan Ahmad Dhani tersebut. "Ini adalah bentuk keseriusan kami, bahwa ka-



KR-Antara/Bagus Ahmad Rizaldi

Musisi Rayendie Rohy Pono alias Rayen Pono melaporkan Anggota DPR RI Ahmad Dhani ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, di Jakarta, Kamis (24/4/2025).

mi menganggap isu ini adalah isu yang serius, isu yang dilakukan oleh bukan hanya oleh seorang musisi, tapi Ahmad Dhani adalah memiliki entitas baru, yaitu sebagai anggota dewan," ujarnya.

Menurut Rayen, laporan tersebut telah diterima oleh MKD dan dalam waktu 14 hari kerja dirinya akan menerima undangan untuk beraudiensi serta memberikan klarifikasi kepada MKD.

"Setelah itu, setelah semua berjalan, mungkin baru proses selanjutnya, nanti kita update lagi," ujarnya.

Sementara kuasa hukum Rayen, Amon Fiago Sianipar mengatakan, pihaknya turut menyerahkan lima alat bukti untuk melengkapi laporan Rayen.

"Kami memberikan sekitar lima bukti, termasuk tangkapan WhatsApp yang sudah beredar, ada juga

* Bersambung hal 9 kol 3

KENANG PAUS FRANSISKUS Umat Kristiani Padati Gereja Katedral

JAKARTA (KR) - Umat Kristiani memadati Gereja Katedral Jakarta untuk mengenang wafatnya Bapa Suci Paus Fransiskus dengan menggelar Misa Requiem, Kamis (24/4) pukul 18.00 WIB. Umat hadir secara bergelombang sejak pukul 16.00 WIB. Banyaknya warga yang ingin mengenang membuat situasi lalu lintas di sekitar Gereja Katedral tersendat.

Mengingat kapasitas ruangan di dalam Gereja Katedral terbatas, warga rela duduk di pelataran halaman depan gereja sembari menyaksikan prosesi Misa Requiem yang dipimpin Duta Besar Vatikan untuk Indonesia.

Sebelumnya, Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo mengatakan, seluruh paroki di Keuskupan Agung Jakarta yang berjumlah 69 paroki diimbau mengadakan Misa Arwah pada Kamis sore. Bila tidak memungkinkan, paroki diperkenankan memilih hari lain untuk menggelar misa tersebut.

Tentang kegiatan di tingkat nasional, Kardinal Suharyo mengatakan, setiap keuskupan di seluruh Indonesia diberikan keleluasaan untuk mengatur agenda doa dan misa sesuai situasi di wilayah masing-masing. "Yang penting umat diajak berdoa bagi Bapa Suci," ujarnya.

Suharyo juga mengumumkan, berdasarkan hasil rapat Dewan Kardinal di Vatikan yang berlangsung Selasa (22/4) pagi waktu Roma, jenazah Paus Fransiskus dipindahkan dari Casa Santa Marta ke Basilika Santo Petrus melalui prosesi panjang pada Rabu (23/4) waktu setempat. Prosesi tersebut dipimpin oleh Kepala Rumah Tangga Vatikan.

* Bersambung hal 9 kol 3

TERKATUNG-KATUNG SELAMA 28 TAHUN

Kasus Hukum Eks Pemain Sirkus Harus Diselesaikan

JAKARTA (KR) - Anggota Komisi XIII DPR Maffirion mendesak kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap para eks pemain sirkus oleh Oriental Circus Indonesia (OCI) Taman Safari segera diselesaikan secara hukum.

Ia mengatakan, langkah tersebut untuk memastikan negara hadir dalam setiap dugaan pelanggaran hak dasar setiap warga. "Kasus ini terkatung-katung selama 28 tahun. Negara tidak boleh abai. Kami minta proses hukum berjalan demi keadilan korban," kata Maffirion dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (24/4).

Persoalan eks pemain sirkus ini telah tiga kali dilaporkan ke Komnas HAM, dengan rekomendasi pelanggaran HAM sejak 1997, namun rekomendasi itu

terkesan diabaikan. "Fungsi Komnas HAM dipertanyakan jika rekomendasinya tidak ditindaklanjuti," ujarnya.

Ia mendorong Komnas HAM menginvestigasi ulang dan membentuk Panitia Kerja (Panja) atau Tim Pencari Fakta. "Jangan

hanya viral karena emosi. Butuh tindakan nyata dan berkelanjutan," tegasnya.

Maffirion menilai, penyelesaian melalui mediasi sudah

tidak mungkin. Sebab, katanya, pelaku terkesan tak peduli dan sulit diajak berunding. Ia menegaskan, tuntutan korban bukan sekadar ganti rugi Rp 3,1 miliar.

* Bersambung hal 9 kol 3



KR-Antara/Rivan Awal Lingga

Sejumlah mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) mengikuti Rapat Mandat Pemain Sirkus (RDPU) dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

**SUNGGUH
SUNGGUH
TERJADI**

● BELUM lama ini saya kulineran tidak jauh dari tempat tinggal. Uniknya, pemilik warung penyetan dan kremes itu menyediakan alat mirip pager. Setiap pembeli difasilitasi alat tersebut. Jika terdengar bunyi tit... tit... tit..., berarti masakan yang dipesan siap diambil. (Agung Hartono, Garum, Kalitengah, Wedi, KlATEN 57461)-d